



Lampiran
Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015

**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan
(RAD-AMPL)
Tahun 2015-20019**



POKJA AMPL
Kelompok Kerja
Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan



Lampiran
Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015

**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan
(RAD-AMPL)
Tahun 2015-20019**

DAFTAR ISI



POKJA AMPL
Kelompok Kerja
Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1-1
1.1. LATAR BELAKANG	1-1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	1-3
1.1.1. Maksud	1-3
1.1.2. Tujuan	1-4
1.3. MANDAT PENYUSUNAN	1-4
1.4. RUANG LINGKUP	1-5
1.4.1. Lingkup Materi	1-5
1.4.2. Lingkup Wilayah	1-5
BAB II	
KONDISI UMUM, PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	2-1
2.1. KONDISI UMUM	2-1
2.1.1. Kondisi Geografis	2-1
2.1.2. Administratif	2-3
2.1.3. Kondisi Topografis	2-4
2.1.4. Kondisi Geohidrologi	2-5
2.1.4.1. Kondisi Air Permukaan	2-5
2.1.4.2. Klimatologi	2-7
2.1.4.2.1. Curah Hujan	2-7
2.1.4.2.2. Suhu Udara	2-8
2.1.5. Demografi, Keuangan & Perekonomian Daerah, Tata Ruang Wilayah dan Sosial Budaya	2-9
2.1.5.1. Pertumbuhan dan Proyeksi Penduduk	2-9
2.1.5.2. Keuangan dan Perekonomian Daerah	2-10
2.1.5.3. Tata Ruang Wilayah	2-12
2.1.5.4. Sosial Budaya	2-16
2.1.5.5. Kelembagaan Pemerintah Daerah	2-18
2.2. KONDISI AWAL	2-19
2.2.1. Pengelolaan Air Bersih	2-19
2.2.2. Kondisi Sanitasi	2-23
2.2.2.1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene	2-23



Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015
Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-20019

2.2.2.2. Pengelolaan Drainase Lingkungan	2-36
2.2.2.2.1. Jaringan Primer	2-37
2.2.2.2.2. Jaringan Sekunder dan Tersier	2-37
2.2.2.3. Pengelolaan Sampah	2-37
2.2.2.3.1. Kondisi Pengelolaan Persampahan	2-37
2.2.2.3.2. Sistem Pengumpulan	2-39
2.2.2.3.3. Sistem Pengangkutan	2-42
2.2.2.3.4. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	2-43
2.2.2.3.5. Karakteristik Sampah	2-45
2.2.2.3.6. Wilayah Layanan Persampahan	2-46
2.3. PERMASALAHAN	2-48
2.3.1. Permasalahan Air Minum	2-48
2.3.2. Permasalahan Sanitasi	2-51
2.4. TANTANGAN	2-53
 BAB III	
ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	3-1
3.1. ISU STRATEGIS	3-1
3.2. Arah Kebijakan	3-2
3.2.1. Visi Pembangunan AMPL Kabupaten Tapin	3-2
3.2.2. Misi AMPL Kabupaten Tapin	3-4
3.3. STRATEGI PENCAPAIAN	3-7
 BAB IV	
PROGRAM DAN KEGIATAN	4-1
 BAB V	
KEBUTUHAN INVESTASI	5-1
 BAB VI	
PEMANTAUAN DAN EVALUASI	6-1
6.1. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	6-1
6.2. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL	6-2
 BAB VII	
PENUTUP	7-1
 LAMPIRAN	a



Lampiran
Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015

**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan
(RAD-AMPL)
Tahun 2015-2019**

DAFTAR TABEL



POKJA AMPL

Kelompok Kerja
Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.	
Sumber Mandat Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL	1-4
Tabel 2.1	
Jarak Ibukota Kabupaten dengan kota Kecamatan	2-2
Tabel 2.2	
Pembagian Administrasi di Kabupaten Tapin	2-3
Tabel 2.3	
Kemiringan Lahan di kabupaten Tapin	2-4
Tabel 2.4.	
DAS / Sub DAS di Kabupaten Tapin	2-6
Tabel 2.5	
Curah Hujan Maksimum, Rata-rata, dan Minimum Bulanan Rata-rata	2-7
Tabel 2.6	
Suhu Maksimum, Rata-rata, dan Minimum Bulanan Rata-rata	2-8
Tabel 2.7	
Perkembangan Penduduk Di Kabupaten Tapin Menurut Kecamatan Tahun 2006 – 2010	2-9
Tabel 2.8	
Ringkasan realisasi APBD 2007 – 2011 Kab. Tapin	2-10
Tabel 2.9	
Data Perekonomian umum daerah Anggaran sanitasi dan belanja modal sanitasi penduduk Tahun 2009 – 2012	2-10
Tabel 2.10	
Data Mengenai Ruang Fiskal Kabupaten Tapin Tahun 2007 - 2011	2-11
Tabel 2.11	
Data Perekonomian umum daerah Tahun 2006 - 2010	2-12
Tabel 2.12	
Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tapin	2-13
Tabel 2.13	
Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapin	2-14
Tabel 2.14	
Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tapin Tahun 2010	2-16
Tabel 2.15	
Informasi Status kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Tapin Maret 2012	2-17
Tabel 2.16	
Jumlah Rumah Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tapin Tahun 2010	2-17
Tabel 2.17	
Penggunaan Air Minum Tiap Kecamatan di Kabupaten Tapin Thn 2009	2-20
Tabel 2.18	
	2-21



Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015
Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-2019

Jumlah Sambungan, Cakupan Pelayanan, dan Panjang Pipa Transmisi-Distribusi PDAM	
Tabel 2.19	
Prakiraan Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Air Bersih di Kab. Tapin 2010 s.d. 2030	2-22
Tabel 2.20	
Rekapitulasi Kondisi Fasilitas Sanitasi Di Sekolah/Pesantren (Tingkat Sekolah: SD/MI/SMP/Mts/SMA/MA/SMK) (Toilet Dan Tempat Cuci Tangan)	2-30
Tabel 2.21	
Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah (Tingkat Sekolah: SD/MI/SMP/Mts/SMA/MA/SMK) (Pengelolaan Sampah Dan Pengetahuan Hygiene)	2-31
Tabel 2.22	
Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik (On Site System)	2-31
Tabel 2.23	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Yang Ada Di Kabupaten Tapin	2-32
Tabel 2.24	
Sebaran Sarana Air Bersih Dan Sarana Air Limbah	2-33
Tabel 2.25	
Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat	2-34
Tabel 2.26	
Volume Sampah Kabupaten Tapin Yang Ditangani Berdasarkan Jenisnya	2-38
Tabel 2.27	
Volume Sampah Di Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2009	2-39
Tabel 2.28	
Jenis, Jumlah, Kondisi Dan Sumber Dana Sarana Pengumpulan Sampah Di Kabupaten Tapin	2-40
Tabel 2.29	
Jenis Dan Jumlah Sarana Pengangkutan Sampah Di Kabupaten Tapin	2-43
Tabel 2.30	
Data Persampahan Eksisting Dinas Kebersihan Kab TAPIN	2-44
Tabel 2.31	
Kondisi Dan Lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Di Kabupaten Tapin	2-46
Tabel 2.32	
Persentase Parameter Air Minum (Air PDAM) Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Kabupaten Tapin Thn 2011	2-50
Tabel 2.33	
Pembangunan AMPL Berdasarkan Aspek Keberlanjutan	2-53
Tabel 3.1.	
Hasil Analisis Faktor Internal dan Eksternal	3-1
Tabel 3.2.	
Nilai dan Definisi Kerja	3-4



Lampiran
Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015

**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan
(RAD-AMPL)
Tahun 2015-20019**

DAFTAR GAMBAR



POKJA AMPL

Kelompok Kerja
Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	
Peta Orientasi Kabupaten Tapin Terhadap wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	2-2
Gambar 2.2	
Kondisi Topografis dan kemiringan Lahan di Kabupaten Tapin	2-3
Gambar 2.3	
Kondisi Hidrologis Di Kabupaten Tapin	2-4
Gambar 2.4	
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tapin	2-15
Gambar 2.5	
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapin	2-15
Gambar 2.6	
Diagram Alir Pengumpulan Sampah Di Kabupaten Tapin	2-41
Gambar 2.7	
Peta Cakupan Layanan Persampahan	2-45
Gambar 2.8	
Layout TPA Gunung Timbung Kec. Piani	2-48
Gambar 2.9	
Diagram Kehilangan Air Pada Sistem Penyediaan Air	2-49



Lampiran
Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015

**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan
(RAD-AMPL)
Tahun 2015-20019**

DAFTAR GRAFIK



POKJA AMPL

Kelompok Kerja
Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1.	
CTPS Di Lima Waktu Penting (Per Kluster)	2-23
Grafik 2.2.	
CTPS di lima waktu penting (skala kabupaten)	2-23
Grafik 2.3.	
Lantai dan Dinding Jamban Bebas Dari Tinja (per kluster)	2-24
Grafik 2.4.	
Lantai Dan Dinding Jamban Bebas Dari Tinja (Skala Kabupaten)	2-24
Grafik 2.5.	
Terdapat Sabun Di Dalam Atau Di Dekat Jamban (Per Kluster)	2-25
Grafik 2.6.	
Terdapat Sabun Di Dalam Atau Di Dekat Jamban (Per Kluster)	2-25
Grafik 2.7.	
Pencemaran Pada Wadah Penyimpanan Dan Penanganan Air (Per Kluster)	2-26
Grafik 2.8.	
Pencemaran Pada Wadah Penyimpanan Dan Penanganan Air (Skala Kabupaten)	2-26
Grafik 2.9.	
Perilaku BABS (Per Kluster)	2-27
Grafik 2.10.	
Perilaku BABS (Skala Kabupaten)	2-27
Grafik 2.11.	
Jamban Terbebas Dari Kecoa Dan Lalat (Skala Kabupaten)	2-28
Grafik 2.12.	
Penggelontor Berfungsi (Skala Kabupaten)	2-28
Grafik 2.13.	
Ibu Rumah Tangga Cuci Tangan (Skala Kabupaten)	2-29



Lampiran
Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015

**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan
(RAD-AMPL)
Tahun 2015-20019**

BAB 1



POKJA AMPL

Kelompok Kerja
Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sektor pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) merupakan salah satu urusan wajib yang telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah yaitu melalui Pemerintah Propinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Pemenuhan layanan di bidang AMPL merupakan upaya strategis dalam peningkatan kesejahteraan dan status kesehatan masyarakat. Terpenuhinya layanan AMPL akan mengurangi beban biaya yang diakibatkan oleh penyakit berbasis air dan sanitasi, sebaliknya jika layanannya buruk akan memberikan akibat langsung terhadap peningkatan kasus-kasus penyakit.

Pentingnya sektor AMPL, telah tertuang dalam Tujuan Pembangunan Millenium Dunia (*Millenium Development Goal's*) yaitu pada tujuan ke-7 target nomor 10 yang menegaskan untuk menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar yang layak serta Rencana Menuju *Universal Access* Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019. Penetapan target tersebut di dasarkan pada fakta pada tahun 2002 masih terdapat 2,6 miliar penduduk tidak memiliki jamban yang layak. Fakta lain bahwa lebih 17% penyebab kematian anak dibawah umur 5 tahun diseluruh dunia dikarenakan penyakit diare. Berdasarkan target tersebut diestimasikan pada tahun 2015 jumlah penduduk tanpa jamban akan menjadi 1,8 miliar. Pada saat ini diperkirakan masih terdapat lebih dari 75 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum yang aman.

Di era saat ini masyarakat tidak lagi menjadi obyek pembangunan, namun sebagai subyek pembangunan. Air minum dan sanitasi adalah kebutuhan dasar manusia. Pemerintah Indonesia bercita-cita di akhir tahun 2019 dapat mencapai universal access air minum dan sanitasi. Ini dimaknai bahwa 100% masyarakat mendapatkan layanan air minum dan sanitasi yang layak. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025. RPJPN mengamanatkan pada akhir periode RPJM 2005-2015 layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita ini tentunya diperlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Data BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa 67,7% penduduk telah mendapatkan layanan air minum aman, baik perpipaan maupun non perpipaan. Sementara untuk pencapaian di sektor sanitasi tahun 2013 adalah sebesar 59,7%. Angka tersebut masih sedikit di bawah target pencapaian MDGs, yaitu 68,87% untuk air minum dan sanitasi 62,4%. Pemerintah optimis dapat mencapai target air minum, namun perlu bekerja lebih keras untuk mencapai target sanitasi.



Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015
Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-2019

Menyadari bahwa penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan wewenang dan tanggung jawab daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memiliki kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan investasi. Semua ini diperlukan agar penyelenggaraan SPAM memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dapat mencapai target RPJMN tahun 2019.

Melalui Program Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemda untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini, pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.

Dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengarusutamaan kebijakan AMPL berbasis masyarakat, maka Pamsimas mendorong Pemda untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL dalam dua cara :

- 1) Penyusunan kebijakan/program prioritas AMPL daerah jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL sebagai dokumen pendukung RPJMD. RAD ini juga menjadi bahan substansi RPJMD bagi Kabupaten/Kota yang sedang menyusun RPJMD dalam pencapaian target RPJMN 2019. Implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten/Kota.
- 2) Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui:
 - Peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, seperti Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BP-SPAMS, dan Kader AMPL;
 - Peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, seperti penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat; dan
 - Pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

Dengan langkah-langkah di atas, dukungan Pamsimas pada Pemda diharapkan cukup kuat untuk percepatan pencapaian target dan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) dan *Universal Access* tahun 2019

Ketersediaan air minum di Kabupaten Tapin sampai saat ini masih jauh dengan apa yang diharapkan yaitu 65%. Dari data yang dapat dikumpulkan diketahui hanya 33% rumah tangga yang dapat mengakses air minum. Masyarakat Kabupaten Tapin dalam mengatasi /mengelola pembuangan air limbah juga masih sangat rendah yaitu baru 15%.

Dalam upaya mencapai tujuan MDGs tersebut, Kabupaten Tapin telah melaksanakan program/ kegiatan melalui berbagai pendekatan yang dilakukan oleh beberapa SKPD antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, BPMD, Dinas Pendidikan Nasional, PDAM, Badan Lingkungan Hidup. Upaya tersebut masih belum optimal karena adanya berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain 1) Banyaknya sarana yang dibangun tidak berkelanjutan yang diakibatkan oleh berbagai faktor; 2) Belum dipahaminya oleh sebagian masyarakat, bahwa air minum dan sanitasi dasar memiliki dampak yang sangat mendasar, sehingga sektor ini belum ditempatkan sebagai program prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Tapin.

Handwritten signature



Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015
Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-20019

Upaya pemenuhan layanan yang keberlanjutan ketersediaan air minum dan sanitasi dasar menjadi tanggung jawab bersama dan oleh karenanya perlu dilakukan serangkaian advokasi melalui berbagai cara. Demikian pula pendekatan strategis untuk menjadikan AMPL sebagai isu bersama yang harus ditangani. Salah satunya dengan mendorong setiap daerah memiliki rencana strategis sebagaimana yang diamanahkan dalam PP No 16 tahun 2005 dimana setiap daerah diharuskan memiliki strategi penyelenggaraan pembangunan air minum dan sanitasi.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai upaya dalam meningkatkan keberlanjutan pembangunan AMPL di daerah, pemerintah pusat telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat yang pada intinya setiap penyelenggaraan pembangunan AMPL harus menerapkan prinsip pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah, termasuk Kabupaten Tapin dalam menjalankan pembangunan nasional terutama pembangunan AMPL di daerah dari waktu ke waktu bukannya dirasakan semakin ringan dan mudah, tetapi pada kenyataannya masih dihadapkan kepada berbagai pergeseran keadaan dan kondisi yang semakin sulit, kompleks dan dinamis serta tantangan yang semakin besar dan beranekaragam sejalan dengan perkembangan tingkat kebutuhan, kesejahteraan dan kemauan masyarakat.

Akses masyarakat miskin terhadap pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang masih rendah merupakan salah satu tantangan atau kendala yang dihadapi termasuk sangat rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

Penyehatan lingkungan/sanitasi juga merupakan permasalahan yang harus diatasi, akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang belum tersedia.

Melihat kondisi di atas Pemerintah Kabupaten Tapin menganggap perlu mengambil sikap, sejalan dengan semangat program Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat untuk menyusun Rencana Strategis sektor pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat guna mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai *Universal Access Air Minum dan Sanitasi 2019* yang dihasilkan pada Johannesburg Summit pada tahun 2002

Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Tapin di dasarkan pada upaya untuk mendorong percepatan dalam pemenuhan layanan kebutuhan dasar di bidang air minum dan penyehatan lingkungan sebagai salah satu kewajiban atau mandatori dalam kerangka otonomi daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Maksud penyusunan Dokumen RAD AMPL adalah agar Pemerintah Kabupaten Tapin mempunyai dasar, acuan, kerangka berpikir dan kerangka bertindak secara strategis bagi instansi pelaksana yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengelolaan pembangunan AMPL.

28



Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015
Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-20019

1.2.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL Kabupaten Tapin yaitu :

- Pedoman pengambilan keputusan dalam pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
- Pedoman pengorganisasian dalam pelaksanaan pembangunan agar sistematis dan terpadu
- Instrumen evaluasi pelaksanaan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
- Instrumen perkiraan pembiayaan dalam pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
- Instrumen investasi sektor penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) berbasis masyarakat di Kabupaten Tapin oleh berbagai pihak.

1.3. MANDAT PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL-BM Kabupaten Tapin didasarkan atas klarifikasi mandat yang bersumber dari hukum/peraturan/kebijakan serta adat istiadat yang dianut dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Tapin yang disajikan secara rinci pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.1.
Sumber Mandat Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL

NO	SUMBER MANDAT	SUBSTANSI	MANDAT
1	Amandemen ke-5 UUD 45 - Pasal 33	Pemanfaatan kekayaan alam	Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
2	UU No. 7 Tahun 2004	Sumber Daya Air	Masyarakat harus terlayani akses AMPL secara berkelanjutan
3	RPJMN Tahun 2010 -2014	Sasaran pembangunan bidang air minum dan penyehatan lingkungan	70% akses air minum 80% akses persampahan Stop BABS 2014 22.500 titik genangan di 100 kawasan strategis tertangani
4	PP No 16 Tahun 2005	Sistem Perencanaan Air Minum	Kewajiban setiap daerah memiliki strategi penyelenggaraan pembangunan air minum dan sanitas

Handwritten signature



Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015
Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-2019

NO	SUMBER MANDAT	SUBSTANSI	MANDAT
5	Kebijakan Nasional AMPL	Pembangunan Berkelanjutan	Akses layanan AMPL yang optimal
6	Visi, Misi dan arah pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2013– 2018	Dasar dalam penyusunan Kebijakan Daerah	Komitmen bersama pelaku pemangku kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ingin dicapai
7	SK Bupati Tapin No. 188.45/232/KUM/2013 Tahun 2011 tentang Pokja AMPL dan Sanitasi	Salah satu pijakan dalam penyusunan Kebijakan Daerah	Program AMPL dan Sanitasi berjalan sesuai dengan rencana
8	Hasil Lokakarya Sosialisasi Penyusunan RAD-AMPL Kabupaten Tapin	Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional dan Strategi Pelaksanaan AMPL serta Rencana Penyusunan RAD-AMPL Kabupaten Tapin	Pelaksanaan program AMPL yang terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan

1.4. RUANG LINGKUP

1.4.1. Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah pemaparan kondisi eksisting kinerja pembangunan AMPL daerah, analisis potensi dan tantangan yang harus disikapi dalam pelaksanaan pembangunan, penetapan arah pembangunan yang dituangkan dalam visi dan misi serta tujuan dan pendiskripsian isu strategis, strategi pembangunan AMPL mencakup tujuan strategis, sasaran pembangunan, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang sebagai acuan seluruh SKPD terkait.

1.4.2. Lingkup Wilayah

Lingkup wilayahnya adalah seluruh Kabupaten Tapin yang meliputi 12 Kecamatan yaitu :

- Candi Laras Utara
- Candi Laras Selatan
- Bakarangan



Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015
Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-20019

- Lokpaikat
- Piani
- Tapin Utara
- Tapin Tengah
- Tapin Selatan
- Bungur
- Salam Babaris
- Binuang
- Hatungun



Lampiran
Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015

**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan
(RAD-AMPL)
Tahun 2015-20019**

BAB 2



POKJA AMPL

Kelompok Kerja
Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan



BAB II

KONDISI UMUM, PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.1. KONDISI UMUM

2.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas lebih kurang 2.174.95 Km² yang merupakan 5,80 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis wilayah Kabupaten Tapin terletak pada koordinat 2° 32' 43" BT - 3° 00' 43" BT dan 114° 46' 13" LS - 115° 30' 33" LS.

Batas wilayah Kabupaten Tapin dinyatakan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar

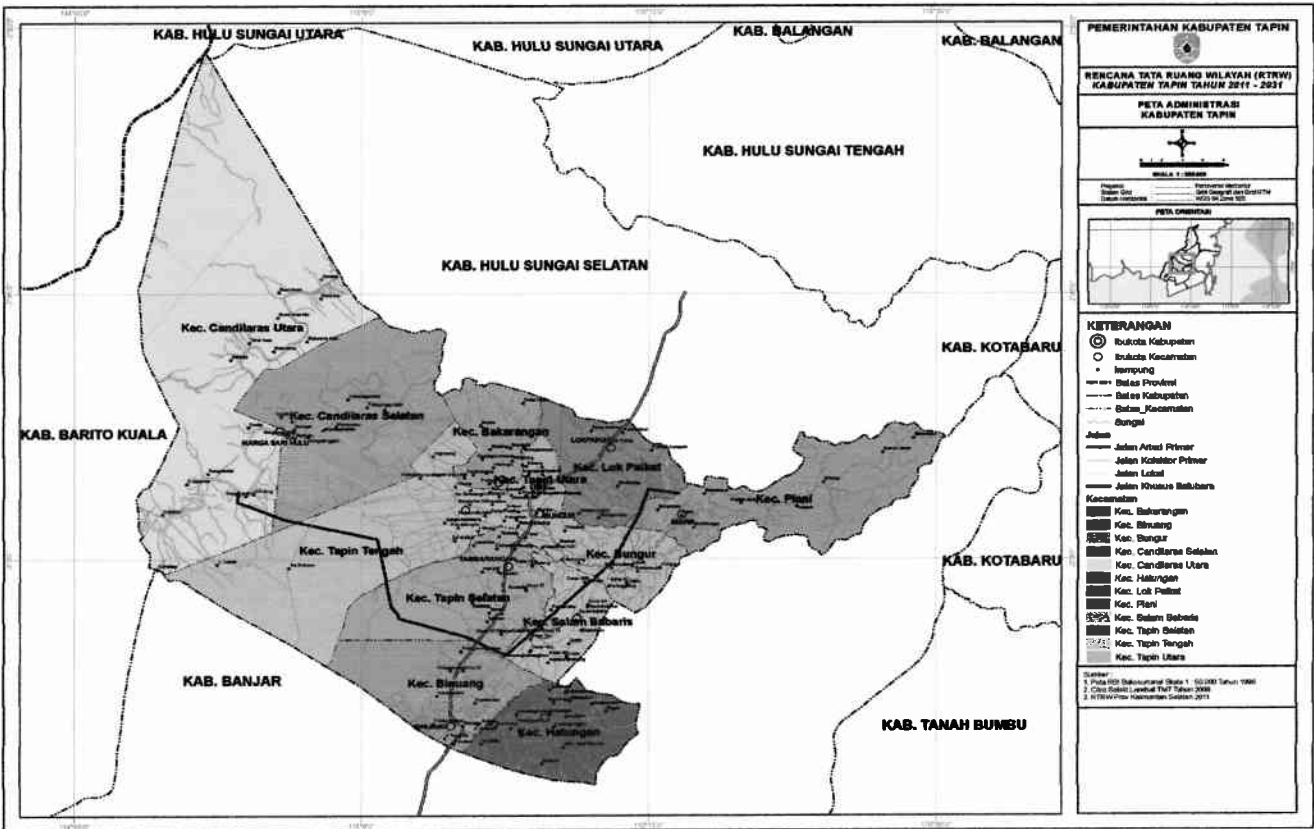
Sedangkan jarak Ibukota kabupaten Tapin dengan Ibukota Provinsi adalah sejauh ± 113 km sementara Jarak Ibukota Kabupaten Tapin dengan kecamatan lain dapat di lihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1.

Tabel 2.1
Jarak Ibukota Kabupaten dengan kota Kecamatan
di Kab. Tapin

21	Tapin Selatan										
31	10	Tapin Tengah									
30	09	08	Tapin Utara								
60	38	22	30	Candi Laras Selatan							
62	40	34	32	02	Candi Laras Utara						
35	13	07	06	29	24	Bakarangan					
50	28	26	20	50	52	24	Piani				
27	05	12	03	33	35	08	23	Bungur			
40	18	19	10	40	42	16	23	13	Lokpaikat		
30	09	19	18	49	49	22	37	14	27	Salam Babaris	
10	31	41	40	70	72	45	60	37	50	40	Hatungun

Sumber : BPS Kab Tapin

Gambar 2.1
Peta Orientasi Kabupaten Tapin Terhadap wilayah Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Tapin Tahun 2011-2031



2.1.2. Administratif

Luas wilayah secara administratif kabupaten Tapin Seluas 2.174.95 Km² yang terbagi atas 12 wilayah kecamatan, dan 133 desa/kelurahan. Secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pembagian Administrasi di Kabupaten Tapin

Kecamatan/ District	Luas (Km ²)/ Area (Sq Km)	Persentase/ Percentage
(1)	(2)	(3)
010. Binuang	132,39	6,09
011. Hatungun	95,60	4,40
020. Tapin Selatan	153,44	7,05
021. Salam Babaris	72,80	3,35
030. Tapin Tengah	309,56	14,23
040. B u n g u r	91,26	4,20
050. P i a n i	200,09	9,20
060. Lokpaikat	93,89	4,32
070. Tapin Utara	32,34	1,49
080. Bakarangan	62,57	2,88
090. Candi Laras Selatan	249,61	11,48
100. Candi Laras Utara	681,40	31,33
J u m l a h	2.174,95	100

Sumber : BPS Kab. Tapin Dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapin



2.1.3. Kondisi Topografis

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut diketahui hampir seluruh area atau 67,34 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tapin berada pada ketinggian 0 – 7 m, sedangkan ketinggian lebih dari 500 m dari permukaan laut hanya berkisar 1,21 %. Berdasarkan kemiringannya Kabupaten Tapin banyak terletak pada kemiringan 0-2 % yaitu sekitar 82,46 % dari total area Kabupaten Tapin, sedangkan kemiringan antara 2,1 sampai 8 % hanya sekitar 6,22 % dari keseluruhan luas daerah di Kabupaten Tapin. Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 8,61 % dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 15 – 40 % (Lihat Tabel 2.3 dan gambar 2.2.)

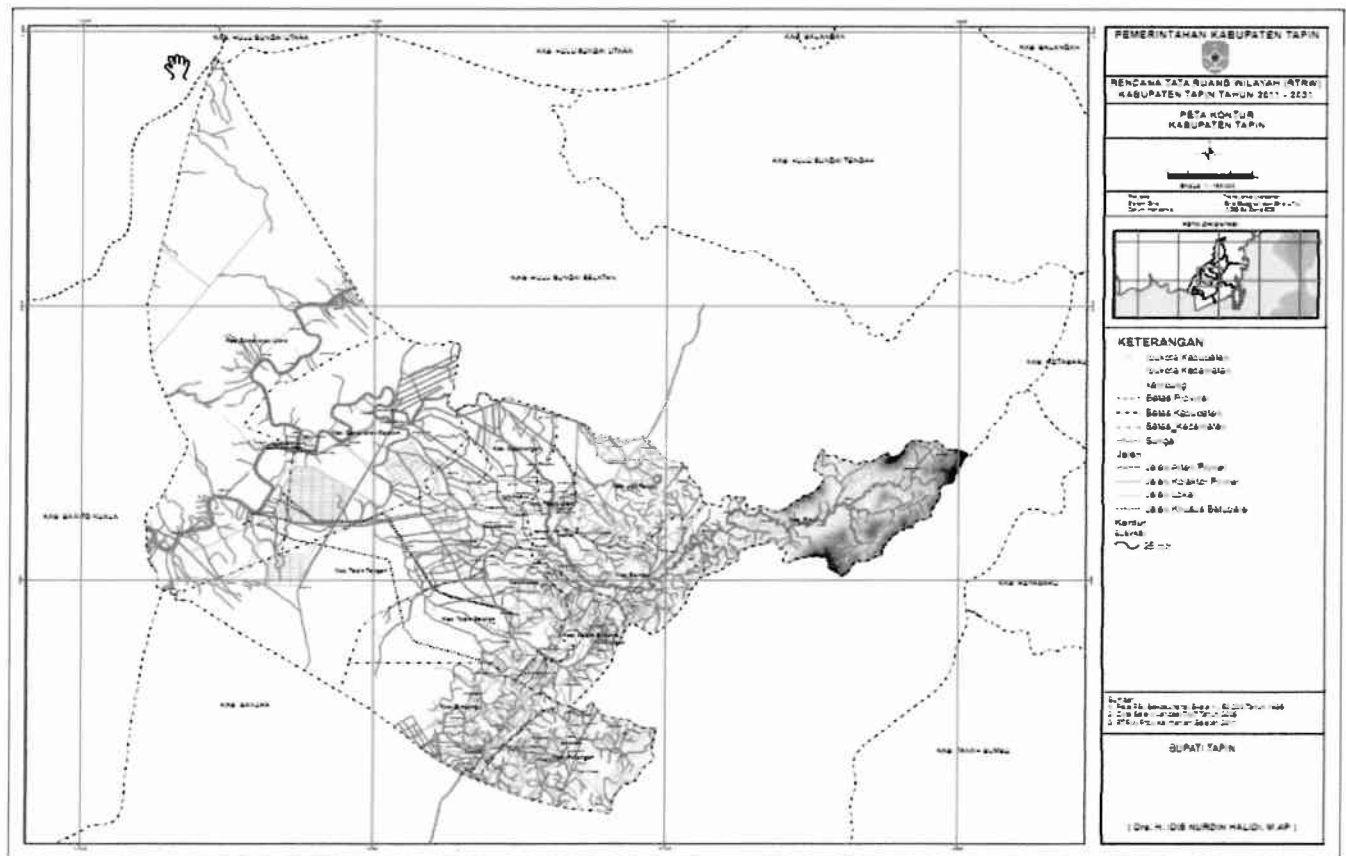
Tabel 2.3
Kemiringan Lahan di kabupaten Tapin

Kecamatan/ District	Kelas Lereng / Kemiringan/Slope Class						Total
	0-2 %	>2- 8 %	>8 - 15 %	>15 – 25 %	>25- 40 %	>40 %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
010. Binuang	12.915	0	0	30	294	0	13.239
011. Hatungun	0	264	6.070	2.110	250	860	9.560
020. Tapin Sel.	15.184	160	0	0	0	0	15.344
021. SIm.Babaris	4.854	576	730	500	160	460	7.280
030. Tapin Teng.	30.956	0	0	0	0	0	30.956
040. Bungur	5.476	0	0	2.780	440	430	9.126
050. Piani	0	1.090	3.150	8.909	2.360	4.140	20.009
060. Lokpaikat	7.369	250	860	580	330	0	9.389
070. Tapin Utara	3.234	0	0	0	0	0	3.234
080. Bakarangan	6.257	0	0	0	0	0	6.257
090. C L S	24.961	0	0	0	0	0	24.961
100. C L U	68.140	0	0	0	0	0	68.140
Jumlah/Total	179.346	2.340	11.170	14.909	3.840	5.980	217.495
Persentase/ Percentage	82,46	1,08	5,14	6,85	1,76	2,71	100,00

Sumber : BPS Kab Tapin 2010

88

Gambar 2.2
Kondisi Topografis dan kemiringan Lahan di Kabupaten Tapin



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Tapin Tahun 2011-2031

2.1.4. Kondisi Geohidrologi

Jenis tanah di Kabupaten Tapin didominasi jenis organosol gleyhumus, yaitu 73,50 % dari luas wilayah. Jenis tanah alluvial yang merupakan tumbuh tanah yang subur luasnya hanya 5,7 % dari luas wilayah Kabupaten Tapin. Disamping itu terdapat pula asosiasi dan kompleks dari kelima jenis tanah utama tersebut. (lihat gambar 2.3).

2.1.4.1. Kondisi Air Permukaan

Sumber-sumber air untuk kebutuhan pertanian di Wlayah Kabupaten Tapin berasal dari air permukaan yang terdiri dari air sungai dan rawa. Wilayah Kabupaten Tapin ditinjau dari daerah aliran sungai (DAS) termasuk dalam DAS Barito, Sub DAS Nagara dan sub-sub DAS Tapin.



Pengaruh pasang surut di Sungai Nagara cukup tinggi, pasang tertinggi terjadi pada musim kemarau (± 1 meter) dan terendah pada musim hujan ($\pm 0,5$ meter). Dan pasang surut dapat mencapai 80 km dari garis pantai.

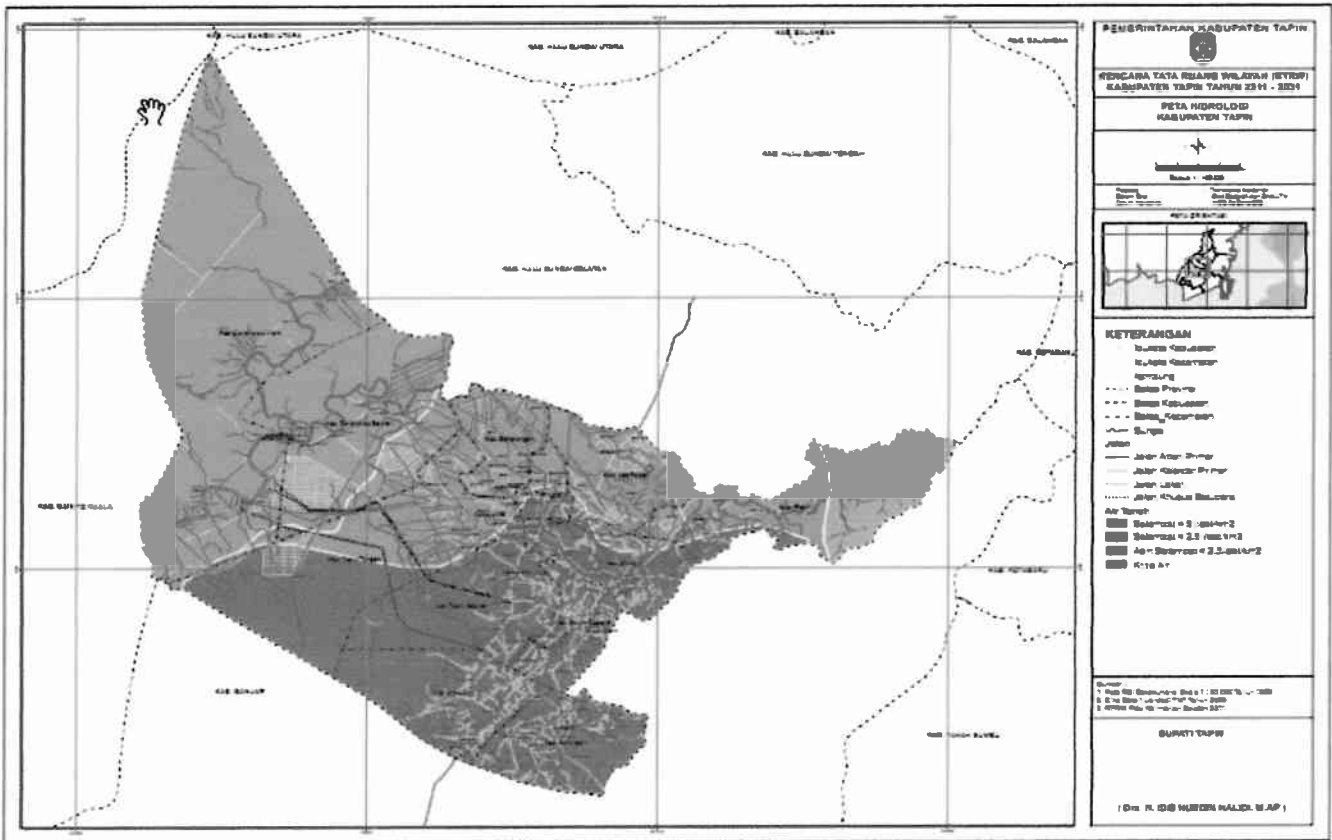
Debit Sungai Nagara yang diukur oleh Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan berfluktuasi sesuai musim. Debit rata-rata terendah terjadi pada bulan September sebesar 19,59 m³/det dan tertinggi pada bulan Januari 247.76 m³/det. Debit Sungai Tapin rata-rata terendah terjadi pada bulan September sebesar 3.30 m³/det dan tertinggi pada bulan Januari 20.25 m³/det. Debit Sungai Antasan/drainase lainnya yang lebih kecil, seperti Sungai Muting sebesar 0.08 m³/det dan Antasan/drainase berkisar antara 3.3 m³/det s/d 15 m³/det).

Tabel 2.4.
DAS / Sub DAS di Kabupaten Tapin

No	Nama DAS	Sub DAS	Luas (Ha)	Debit
1	Barito	Nagara		247,76 m ³ /dt

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Tapin Tahun 2011-2031

Gambar 2.3
Kondisi Hidrologis Di Kabupaten Tapin



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Tapin Tahun 2011-2031

88



2.1.4.2. Klimatologi

Kabupaten Tapin dipengaruhi 2 musim yaitu musim hujan dan musim panas. Musim hujan terdiri antara bulan Nopember hingga bulan April dengan temperatur 27°C - 28°C. Sedangkan musim panas terjadi antara bulan April hingga bulan Nopember dengan temperature mencapai 35°C dengan kelembaban udara berkisar antara 51 % sampai dengan 86 %.

2.1.4.2.1. Curah Hujan

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat curah hujan rata-rata berkisar antara 10 mm – 24,17 mm per hari. Menurut klasifikasi iklim Oldman, wilayah Kabupaten Tapin berada pada kelas C2, C3 dan D3 dengan rangking kebasahan antara 5 – 8.

Tabel 2.5			
Curah Hujan Maksimum, Rata-rata, dan Minimum Bulanan Rata-rata			
B u l a n	Jumlah curah Hujan / Number of Rainfall (mm)	Jumlah Hari Hujan / Number of Randays (mm)	Rata-rata Curah hujan/hari Average of Rainfall
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Januari/January	183	10	18,30
02. Pebruari/February	80	7	11,43
03. Maret/March	250	11	22,73
04. April/April	145	6	24,17
05. Mei/May	130	9	14,44
06. Juni/June	95	7	13,57
07. Juli/July	-	-	-
08. Agustus/August	-	-	-
09. September/September	40	4	10,00
10. Oktober/October	110	8	13,75
11. Nopember/November	260	13	20,00
12. Desember/December	273	16	17,06

Sumber : BPS Kab Tapin dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin, Station Bungur



2.1.4.2.2. Suhu Udara

Tabel 2.6
Suhu Maksimum, Rata-rata, dan Minimum Bulanan Rata-rata

Bulan/Month	Kelembaban Udara/ Relative humidity (%)			Temperatur/ Temperature (°C)		
	Maks /Max	Min/ Min	Ratarata/ Average	Maks /Max	Min/ Min	Rata-rata/ Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Januari/January	93,0	36,0	82,3	29,5	27,3	28,3
02. Pebruari/February	89,0	71,0	80,0	29,8	27,3	28,7
03. Maret/March	91,0	74,0	80,0	30,0	26,8	28,7
04. April/April	96,0	74,0	81,0	29,5	26,5	28,6
05. Mei/May	95,0	78,0	85,0	29,5	25,8	28,3
06. Juni/June	98,0	74,0	83,0	29,5	25,5	27,9
07. Juli/July	96,0	56,0	75,0	28,5	26,0	27,4
08. Agustus/August	90,0	49,0	67,0	29,5	29,8	28,6
09. September/September	94,0	66,0	73,0	29,8	26,0	28,6
10. Oktober/October	87,0	65,0	77,0	30,0	26,3	28,5
11. Nopember/November	96,0	75,0	85,0	29,3	24,8	27,6
12. Desember/December	97,0	77,0	85,0	28,5	24,5	27,1

Sumber : BPS Kab Tapin dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin, Station Bungur

08



2.1.5. Demografi, Keuangan & Perekonomian Daerah, Tata Ruang Wilayah dan Sosial Budaya

2.1.5.1. Pertumbuhan dan Proyeksi Penduduk

Pada kurun waktu antara tahun 2006 – 2010 terjadi penambahan jumlah penduduk yang relatif stabil yaitu berturut-turut 1.654, 1.389, 2.022 dan 10.731. Dari data yang ada memperlihatkan suatu yang wajar adanya komposisi jumlah penduduk dan sistem sosial yang terbentuk memungkinkan untuk terjadi pertumbuhan penduduk yang relatif stabil.

Pada kurun wakt 4 tahun 2006 s.d 2010 terjadi pertumbuhan penduduk sebanyak 6.797 jiwa atau rata-rata sebesar 1.700 jiwa atau 1,099% per tahun.

Pada tabel 2.7 berikut disajikan jumlah penduduk tahun selama 5 tahun terakhir (2006 – 2010). Sementara proyeksi pertumbuhan penduduk selama 5 tahun kedepan berdasarkan angka pertumbuhan penduduk belum dapat diperoleh dari BPS tingkat kabupaten disebabkan data tersebut masih menunggu data proyeksi penduduk dari BPS pusat di bulan Juni 2012.

Tabel 2.7
Perkembangan Penduduk Di Kabupaten Tapin Menurut Kecamatan
Tahun 2006 – 2010

No	Kecamatan	Tahun (jiwa)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Binuang	23.328	23.49	23.516	24.011	27.299
2	Hatungun	7.679	7.693	7.849	7.864	8.015
3	Tapin Selatan	15.756	15.773	16.106	16.123	17.979
4	Salam Babaris	8.566	8.947	8.756	9.146	11.057
5	Tapin Tengah	18.348	18.567	18.755	18.979	17.588
6	Bungur	9.156	9.288	9.359	9.494	11.621
7	Piani	4.884	4.894	4.992	5.003	5.372
8	Lokpaikat	7.665	7.728	7.835	7.9	8.915
9	Tapin Utara	19.999	20.318	20.443	20.769	23.162
10	Bakarangan	8.565	8.61	8.755	8.801	8.617
11	Candi Laras Selatan	11.988	12.129	12.254	12.398	12.056
12	Candi Laras Utara	16.067	16.218	16.424	16.578	16.115
Jumlah		152.001	153.655	155.044	157.066	167.796
Peningkatan			1.654	1.389	2.022	10.73

Sumber : Masterplan Air Bersih Kab. Tapin 2010



Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015
Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-20019

2.1.5.2. Keuangan dan Perekonomian Daerah

Tabel 2.8
Ringkasan realisasi APBD 2007 – 2011 Kab. Tapin

No	Anggaran	2006	2007	2008	2009	2010
A	Pendapatan					
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22,412,435,884	18,963,377,779	18,889,671,480	18,651,686,714	20,737,650,855
2	Dana Perimbangan (Transfer)	299,153,310,510	312,466,913,674	387,953,267,067	410,481,172,710	433,543,720,902
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	6,086,608,052	18,694,850,000	87,795,400,000	68,638,179,243	88,118,988,830
Jumlah Pendapatan		327,652,354,446	350,125,141,453	494,638,338,547	497,771,038,667	542,400,360,587
B	Belanja					
1	Belanja Tidak Langsung		197,273,355,175	223,352,126,061	202,910,862,588	263,468,735,941
2	Belanja Langsung	293,664,685,262	246,164,502,791	374,795,985,648	293,608,380,561	303,804,611,149
Jumlah Belanja			443,437,857,966	598,148,111,709	496,519,243,149	567,273,347,090
surplus/Defisit Anggaran		33,987,669,184	93,312,716,513	103,509,773,162	1,251,795,518	-24,872,986,503

Sumber : KDA Kab Tapin tahun & Buku Putih Sanitasi PPSP 2012

Tabel 2.9

Data Perekonomian umum daerah Anggaran sanitasi dan belanja modal sanitasi penduduk Tahun 2009 – 2012

No	Deskripsi	2009	2010	2011	2012
a	b	c	d	e	f
A	Dinas Pekerjaan Umum				
1	Air Limbah Domestik	643,500,000	561,132,000		898,433,000
2	Sampah rumah tangga				
3	Drainase lingkungan	5,615,700,000	1,154,288,122	2,410,869,000	4,770,000,000
B	Dinas Tata Kota dan Kebersihan				
1	Air Limbah Domestik				
2	Sampah rumah tangga	180,000,000	1,592,985,000	1,854,920,000	2,555,000,000
3	Drainase lingkungan	800,300,000	904,454,250	445,235,000	750,000,000
C	Dinas Kesehatan				
1	Aspek PHBS (pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan)		32,570,000	56,945,000	75,000,000



Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015
Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-2019

No	Deskripsi	2009	2010	2011	2012
a	b	c	d	e	f
D	Badan Lingkungan Hidup				
1	Air Limbah Domestik	24,755,000	15,000,000	69,430,000	63,500,000
2	Sampah rumah tangga				
3	Drainase lingkungan				
E	Dinas Pengelolaan Pasar				
1	Air Limbah Domestik				
2	Sampah rumah tangga			50,000,000	
3	Drainase lingkungan		97,587,000		130,000,000
F	Total belanja modal sanitasi (A s/d E)	7,264,255,000	4,358,016,372	4,887,399,000	9,241,933,000
G	Total belanja modal sanitasi dari APBD murni (bukan Pedamping)	726,425,500	435,801,637	488,739,900	924,193,300
H	Total belanja APBD	726,425,500	435,801,637	488,739,900	924,193,300
I	Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total (9:10x100%)	10%	10%	10%	10%
J	Jumlah penduduk	165,447	167,685	166,877	169,781
K	Belanja Modal Sanitasi per penduduk (F:J)	43,907	25,989	29,287	54,434

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Tapin tahun 2009-2012 & Buku Putih Sanitasi PPSP 2012

Tabel 2.10
Data Mengenai Ruang Fiskal Kabupaten Tapin Tahun 2007 - 2011

Tahun	Indeks kemampuan Fiskal/Ruang Fiskal Daerah	Keterangan
2007	1.8492	tinggi
2008	1.8682	tinggi
2009	2.8285	sangat tinggi
2010	3.5668	sangat tinggi
2011	2.2247	sangat tinggi

Sumber : www.depkeu.go.id & Buku Putih Sanitasi PPSP 2012

88